

**SINERGI TNI AD DENGAN POLRI DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
(Studi Kasus Kota Tarakan)**

Agus Subagyo, Dr Yudi Rusfiana S.IP, M.Si

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNJANI Cimahi, Dosen Fakultas Politik Pemerintahan
IPDN Jatinangor

Email : agus.subagyo@lecture.unjani.ac.id, yudi.rusfiana@yahoo.com

Abstract

This paper would like to describe the synergy of Indonesia Army (Kodim 0907 / Tarakan) with Police (Police of Tarakan) and Government (Local Government of Tarakan City) in handling social conflict in the community, covering conflict prevention, conflict stopping and conflict recovery. The multi-ethnic and multicultural area of Tarakan City is very vulnerable to social conflicts that can not be handled only by Kodim 0907 / Tarakan alone, but involving other related parties, such as the Tarakan Police and the Tarakan City Government. Communication, coordination, and collaboration between these three pillars are expected to be able to deal with social conflict in the community

Keyword: Synergy, Army, Police, Local Government, Social Conflict.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, Indonesia menghadapi berbagai perubahan sosial yang sangat drastis, dramatis, dan massif. Masuknya berbagai ideologi, budaya dan teknologi asing telah mempengaruhi seluruh sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.¹ Budaya nasional dan budaya lokal mulai mengalami kepunahan digantikan oleh budaya global, budaya populer, dan budaya universal, yang tentunya berdampak pada hilangnya sikap toleransi, punahnya perilaku gotong royong,

habisnya nilai sopan santun, dan musnahnya etika di tengah masyarakat.

Rasa nasionalisme, semangat patriotisme, cinta tanah air, rela berkorban, dan militansi bangsa telah mengalami penurunan yang berakibat pada ikatan persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Generasi muda Indonesia saat ini sudah tidak lagi memahami sejarah, kurang menghormati budaya dan adat istiadat, serta kurang peduli dengan nilai-nilai perjuangan para “founding fathers”. Generasi milenial yang sering di sebut sebagai “generasi jaman now”, banyak berkulat pada sikap yang pragmatis, serba “instant”, dan serba “potong kompas”.

¹ Syarifudin Tippe & Agus Subagyo, *Kapita Selekta Hubungan Internasional*, Bandung : Alfabeta, 2016, hal. 25.

Ditambah lagi dengan munculnya sikap intoleransi, menguatnya kelompok radikal, mengemukanya terorisme, dan menghangatnya separatisme, semakin menciptakan kerawanan sosial di tengah masyarakat.² Struktur masyarakat Indonesia yang multi agama, multi etnis, dan multi bahasa sangat rawan untuk terjadinya berbagai konflik sosial, kekerasan massal, dan kerusuhan. Terlebih lagi dengan adanya konflik politik akibat dibukanya “kran” demokrasi yang menyebabkan masyarakat terpecah belah oleh pilihan politik, khususnya menjelang Pilkada, Pileg, dan Pilpres.

Salah satu wilayah Indonesia yang rentan terjadinya konflik sosial adalah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Wilayah Kota Tarakan merupakan wilayah yang sangat strategis karena menjadi pusat bisnis, pusat industri dan pusat perekonomian terbesar di Provinsi Kalimantan Utara, menjadi parameter perekonomian di Propinsi Kalimantan Utara, dan menjadi motor penggerak atau lokomotif aktifitas utama ekonomi, bisnis dan pariwisata di Propinsi Kalimantan Utara. Sumber daya alam yang melimpah, khususnya minyak menjadi motor penggerak dan urat nadi perekonomian wilayah Kalimantan Utara pada umumnya dan Kota Tarakan pada khususnya.

Akan tetapi dibalik kekayaan alam yang melimpah ini terkandung potensi kerawanan konflik sosial. Wilayah Kota Tarakan rawanterjadinya konflik sosial, konflik SARA dan konflik lainnya sebagai akibat dari aktviitas politik, pemerintahan dan demokrasi, berupa Pilkada, Pileg, dan Pilpres. Terlebih lagi pernah terjadi konflik sosial dan kerusuhan massal yang terjadi pada tanggal 27 September 2010 yang memakan korban nyawa dan harta benda serta gelombang pengungsi antara suku Tidung (pribumi) dengan suku Bugis (suku pendatang). Hal ini tentu menjadi perhatian dan skala prioritas untuk di deteksi, dicegah dan ditanggulangi, sehingga konflik sosial yang potensial terjadi dapat diantisipasi dan dapat dicegah seminimal mungkin, agar supaya kehidupan masyarakat dan kenyamanan masyarakat dapat terjamin dan terlindungi.

Sebagai satuan komando kewilayahan yang membawahi wilayah Kota Tarakan, Kodim 0907/Tarakan memiliki tugas dan tanggungjawab untuk membantu pemerintah Daerah Kota Tarakan dan Polresta Tarakan untuk memelihara situasi kondusif di tengah masyarakat. Dalam perspektif organisasi TNI AD, Kodim 0907/Tarakan berupaya keras dan sekuat tenaga untuk memelihara / menjaga situasi dan keadaan yang kondusif dan menciptakan stabilitas keamanan. Kodim 0907/Tarakan selalu

² Agus Subagyo, *Teroris(me) : Aktor dan Isu Global Abad XXI*, Bandung : Alfabeta, 2015, hal. 2

berpegang teguh pada UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa TNI sebagai komponen utama / alat pertahanan negara menghadapi ancaman militer dan non militer baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Hal ini diperkuat dengan UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI, terutama Pasal 7, ayat 2, butir 9, yang berbunyi : **“membantu tugas pemerintahan di daerah”**, dan butir 10 yang berisi : **“membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang”**. Dalam aturan yang terdapat dalam UU TNI tersebut, khususnya banyak orang menyebut dengan pasal Operasi Militer Selain Perang (OMSP), jelas sekali bahwa TNI harus berkewajiban membantu Pemerintah (dan Pemerintah Daerah) serta Polri dalam memelihara situasi yang kondusif di tengah masyarakat supaya pembangunan ekonomi, pembangunan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Atas dasar itulah, Kodim 0907/Tarakan berkomitmen dan berjuang membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Polri dalam menciptakan situasi yang kondusif, bekerjasama / bermitra / bersinergi dengan semua komponen bangsa lainnya. Kodim 0907/Tarakan tidak dapat sendirian dalam

melakukan pengamanan terhadap jalannya kehidupan kemasyarakatan, melainkan memerlukan sinergi dengan Polri dan Pemda untuk menciptakan situasi kondusif dalam rangka terwujudnya stabilitas keamanan.

KERANGKA TEORITIS

Dalam perspektif konflik, Gillin dan Gillin menyatakan bahwa konflik merupakan bagian dari interaksi sosial yang membentuk pola pertentangan atau perlawanan dan kekerasan. Dalam kaitan ini, interaksi sosial yang bersifat disosiatif akibat perbedaan atau keragaman, baik yang mencakup fisik, emosi, kebudayaan, maupun perilaku adalah bagian utama dari bentuk konflik³. Pengertian konflik sosial menurut Soerjono Soekanto, adalah proses sosial antar individu atau kelompok yang berusaha mencapai sebuah tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, cara yang dilakukan adalah dengan menantang atau menentang pihak lawan dan dapat disertai ancaman maupun kekerasan yang melahirkan kegaduhan⁴.

Adapun penanganan konflik sosial menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 adalah serangkaian kegiatan

³ Pendapat Gillin & Gillin ini dikutip dari Lambang Triyono, *Spiral Kekerasan Kolektif dan Konflik Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014, hal.m. 41

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, hal.m. 29

yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik⁵. Lebih detail lagi Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial menyatakan bahwa penanganan konflik sosial harus dilakukan secara sinergis oleh Pemerintah / Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Polri, TNI, dan semua *stakeholder* terkait⁶.

Selanjutnya, MoU Polri dengan TNI Nomor B/2/2018 dan Nomor Kerma/2/I/2018 Tentang Perbantuan TNI Kepada Polri Dalam Kamtibmas mengatur tentang perbantuan TNI untuk Polri, misalnya dalam menghadapi unjuk rasa, mogok kerja, kerusuhan massa, konflik sosial, dan mengamankan kegiatan masyarakat dan pemerintah. Pasal 2 MoU ini menjabarkan bahwa TNI bisa terlibat dalam: a) Perbantuan menghadapi unjuk rasa maupun mogok kerja; b) Menghadapi kerusuhan massa; c) Menangani konflik sosial; d) Mengamankan kegiatan masyarakat dan atau pemerintah di dalam negeri yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional yang mempunyai kerawanan, dan; e) Situasi lain yang

memerlukan bantuan TNI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan⁷.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data, fakta dan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁸ Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka / studi dokumentasi / studi literatur

Informan dipilih secara purposive sampling, yang terdiri atas unsur Kodim, Polresta, Pemda, dan Masyarakat. Adapun jumlah informan secara rinci dalam penelitian ini ditampilkan dalam Tabel 1 berikut :

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik Sosial

⁷ MoU Polri dengan TNI Nomor B/2/2018 dan Nomor Kerma/2/I/2018 Tentang Perbantuan TNI Kepada Polri Dalam Kamtibmas

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, Bandung : Alfabeta, 2010, hal. 52

Tabel 1. Daftar Jenis dan Jumlah Informan

NO	UNSUR	INFORMAN	JUMLAH
1	Kodim	Dandim	1
		Kasdim	1
		Danramil	2
		Babinsa	3
		Sub Total	6
2	Pemda	Walikota	1
		Wakil Walikota	1
		Ketua DPRD	1
		Anggota DPRD	1
		Kakesbanglinmas	1
		Camat	1
		Sub Total	6
3	Polresta	Kapolres	1
		Wakapolres	1
		Kasat Reskrim	1
		Kasat Sabhara	1
		Kapolsek	1
		Bhabinkamtibmas	1
		Sub Total	6
4	Masyarakat	Kelompok Intelektual	4
		Partai Politik	6
		Tokoh Masyarakat	4
		Tokoh Agama	4
		Tokoh Pemuda	4
		Pers / Media	2
		NGO / LSM	2
		KPUD	2
		Panwaslu	2
		Sub Total	25
		TOTAL	48

PEMBAHASAN

1. Posisi Strategis Kota Tarakan

Kota Tarakan merupakan Kota ke-17 terkaya di Indonesia, kota terbesar di Provinsi Kalimantan Utara, dan berada di wilayah perbatasan, serta pernah kejadian kerusuhan etnis pada tahun 2010. Wilayah Kota Tarakan sangat strategis apabila dilihat dari berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Dalam aspek politik, wilayah Kota Tarakan memiliki dinamika kehidupan

politik yang sangat dinamis, dimana PAN, Partai Demokrat, PDIP dan Partai Golkar merupakan partai terbesar yang memiliki basis masa yang kuat dan merupakan pemenang pada Pileg 2014 sehingga menguasai DPRD Kota Tarakan sehingga pertarungan Pilkada, Pileg dan Pilpres diwarnai oleh pergulatan sengit antar partai politik tersebut.

Dalam aspek ekonomi, wilayah Kota Tarakan merupakan pusat ekonomi Provinsi Kalimantan Utara, pusat bisnis dan pusat perdagangan di Provinsi

Kalimantan Utara, serta sebagai kota terbesar di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Di wilayah ini terdapat kandungan minyak yang besar sehingga menjadikan Kota Tarakan sebagai kota minyak, kota industri dan kota bisnis di wilayah Kalimantan Utara.

Dalam aspek sosial budaya, wilayah Kota Tarakan mayoritas beragama Islam yang diwarnai dengan suasana religius dan secara etnis terdapat etnis besar, yakni suku tidung (sebagai suku pribumi) dan suku Jawa dan suku Bugis (yang merupakan suku pendatang). ini sangat rawan terjadi konflik sosial mengingat pernah terjadi kerusuhan pada tanggal 27 September 2010 yang menjadi sorotan nasional karena mengakibatkan korban nyawa, harta benda, dan penduduk mengungsi akibat konflik antara suku tidung dengan suku Bugis.

Dalam aspek pertahanan keamanan, wilayah Kota Tarakan sangat strategis untuk dijadikan sebagai wilayah pertahanan karena berdekatan dengan negara tetangga, yakni Malaysia, khususnya Blok Ambalat, sehingga sering menjadi tempat latihan tempur bagi TNI AD, sebagai basis pertahanan di wilayah perbatasan. Kota Tarakan menjadi basis pertahanan Indonesia pada saat menghadapi musuh yang datang dari Utara, sehingga sangat vital posisinya dilihat dari aspek pertahanan negara.

2. Sejarah Konflik Sosial Di Kota Tarakan

Dalam perspektif historis, di Kota Tarakan pernah terjadi konflik etnis yang menjadi sorotan nasional mengingat adanya korban meninggal dunia, korban luka berat dan ringan.⁹ Kerusuhan sosial ini juga menimbulkan kerugian harta benda, kebakaran rumah, pengrusakan fasilitas sosial umum, dan gelombang pengungsian. Konflik yang bermula dari persoalan ringan, bersifat pribadi dan termasuk kriminal murni, telah menjalar pada konflik antar etnis, yakni antara suku Tidung dan suku Bugis.

Konflik etnis yang mengarah konflik sosial dan merembet terjadinya kerusuhan sosial ini telah menjadi sorotan nasional, yang mendorong aparat keamanan, khususnya TNI dan Polri mengerahkan pasukannya di wilayah Tarakan untuk meredam agar konflik tidak meluas di seluruh masyarakat Kota Tarakan. Gambaran umum peristiwa konflik sosial di Kota Tarakan dapat dilihat pada kutipan sebagai berikut :

“Pada tanggal 26 September 2010, terjadi perselisihan antara dua kelompok pemuda di kawasan Perumahan Juata Permai yang mengakibatkan seorang pemuda bernama Abdul Rahmansyah terluka di telapak

⁹

<http://www.tribunnews.com/nasional/2010/09/30/in-i-kronologi-lengkap-kerusuhan-tarakan-versi-polri>. Diunduh pada tanggal 27 Mei 2018, Jam 14.00 WIB

tangan. Abdul pulang ke rumah untuk meminta pertolongan dan diantar pihak keluarga ke RSUD Tarakan untuk berobat. Pada 27 September sekitar pukul 00.30 Wita, Abdullah (56), orangtua Abdul Rahmansyah, beserta enam orang yang merupakan keluarga dari suku Tidung berusaha mencari para pelaku pengeroyokan dengan membawa senjata tajam berupa mandau, parang, dan tombak. Mereka mendatangi sebuah rumah yang diduga sebagai rumah tinggal salah seorang dari pengroyok di Perum Korpri. Penghuni rumah yang mengetahui rumahnya akan diserang segera mempersenjatai diri dengan senjata tajam berupa badik dan parang. Setelah itu, terjadilah perkelahian antara kelompok Abdullah dan penghuni rumah tersebut yang adalah warga suku Bugis Letta. Abdullah meninggal dengan kondisi kedua tangannya terpotong akibat ditebas senjata tajam. Pukul 01.00 Wita, sekitar 50 orang dari kelompok suku Tidung menyerang Perum Korpri. Para penyerang membawa mandau, parang, dan tombak. Mereka merusak rumah Noordin, warga suku Bugis Letta. Pukul 05.30 Wita terjadi pula aksi pembakaran rumah milik Sarifudin, warga suku Bugis Letta, yang juga tinggal di Perum Korpri. Pukul 06.00 Wita, sekitar 50 orang dari suku Tidung mencari Asnah, warga suku Bugis Letta. Namun, ia diamankan anggota Brimob. Pukul 10.00 Wita, massa kembali mendatangi rumah tinggal Noodin, warga suku Bugis Letta dan langsung membakarnya. Pukul 11.00 Wita, massa kembali melakukan perusakan terhadap empat sepeda motor yang berada di rumah Noodin. Pukul 14.30

Wita, Abdullah, korban tewas dalam pertikaian dini hari, dimakamkan di Gunung Daeng, Kelurahan Sebengkok, Tarakan Tengah, Tarakan. Pukul 18.00 Wita, terjadi pengeroyokan terhadap Samsul Tani, warga suku Bugis, warga Memburungan, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, oleh orang tidak dikenal. Pukul 18.00 Wita, personel gabungan dari Polres Tarakan (Sat Intelkam, Sat Reskrim, dan Sat Samapta) diperbantukan untuk mengamankan tempat kejadian perkara. Pukul 20.30 Wita hingga 22.30 Wita, berlangsung pertemuan yang dihadiri unsur pemda setempat, seperti Wali Kota Tarakan, Sekda Kota Tarakan, Dandim Tarakan, Dirintelkam Polda Kaltim, Dansat Brimob Polda Kaltim, Wadir Reskrim Polda Kaltim, serta perwakilan dari suku Bugis dan suku Tidung. Pertemuan berlangsung di Kantor Camat Tarakan Utara. Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa masalah yang terjadi adalah masalah individu. Para pihak bertikai sepakat menyerahkan kasus tersebut pada proses hukum yang berlaku. Polisi segera bergerak mencari pelaku. Semua tokoh dari elemen-elemen masyarakat memberikan pemahaman kepada warganya agar dapat menahan diri".¹⁰

3. Potensi Konflik Sosial Di Kota Tarakan

Potensi konflik sosial di Kota Tarakan sebenarnya cukup besar apabila

¹⁰

https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Tarakan.
Diunduh pada tanggal 27 Mei 2018, Jam 13.00 WIB.

tidak diwaspadai dan dirawat dengan baik, mengingat banyaknya permasalahan ekonomi, sosial dan budaya di tengah masyarakat. Dalam perspektif ekonomi, terdapat ketimpangan ekonomi yang cukup besar antara masyarakat pribumi dan masyarakat pendatang. Masyarakat pribumi, yang berasal dari suku Bugis, suku Jawa, suku Madura, dan suku Bali, umumnya memiliki taraf ekonomi dan pendapatan yang baik. Sedangkan masyarakat pribumi; suku Tidung, umumnya status ekonominya relatif miskin.

Dalam perspektif sosial budaya, adat istiadat, budaya, seni, dan bahasa diantara penduduk di Kota Tarakan yang multi etnis sangat beragam sehingga rentan terjadinya gesekan dan gejolak sosial. Kerawanan sosial yang terjadi di tengah masyarakat semakin menguat apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam perspektif politik, adanya kegiatan Pilkada, Pilpres, maupun Pileg akan semakin menguatkan politik identitas, lahirnya semangat kesukuan, dan timbulnya gesekan akibat ulah para politisi yang ingin meraup suara sebesar-besarnya tanpa memperdulikan solidaritas sosial dan kohesi sosial.

Kondisi tersebut akan menjadi runyam dan pelik jika terdapat aksi dan provokasi dari kelompok tertentu yang memanasakan situasi sehingga bisa menyebabkan terciptanya gesekan antar

kelompok di tengah masyarakat. Isu-isu sensitif, seperti penerimaan ASN, Pilkada, Pileg dan Pilpres, serta penempatan posisi di lingkungan birokrasi pemerintahan dapat berpotensi timbulnya kerawanan sosial yang mengarah konflik sosial di tengah masyarakat.

4. Sinergi Kodim dengan Polresta dan Pemda Kota Tarakan Dalam Menangani Konflik Sosial

Sinergi jajaran Kodim 0907/Tarakan dengan jajaran Polresta Tarakan dan jajaran Pemda Kota Tarakan dalam menangani konflik sosial sebenarnya sudah baik, sudah optimal dan sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari aspek pencegahan, penghentian, dan pemulihan konflik sosial sebagai berikut :

a. Pencegahan Konflik Sosial

Dalam aspek pencegahan konflik, kegiatan yang dilakukan oleh Kodim 0907/Tarakan bersama-sama dengan jajaran Polresta Tarakan dan Pemda Kota Tarakan adalah mengedepankan identifikasi potensi konflik, pendataan kelompok radikal di tengah masyarakat, pengembangan sistem deteksi dini, sistem cegah dini, dan sistem tangkal dini, dengan ujung tombak adalah Babinsa, Babhinkamtibmas, dan Lurah, sebagai bagian dari tiga pilar Kamtibmas.

Agar pencegahan konflik sosial ini berjalan efektif, terdapat serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh jajaran Kodim 0907/Tarakan bersama dengan Polresta Tarakan dan Pemda Kota Tarakan, yaitu:

- Mendorong pranata adat dan atau pranata sosial untuk menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat melalui musyawarah untuk mufakat yang hasilnya mengikat para pihak
- Mengedepankan pemenuhan keadilan dalam upaya penyelesaian perselisihan, khususnya terhadap pelanggaran hukum yang ringan atau kerugiannya kecil dan atau pelakunya anak-anak dan orang lanjut usia.
- Penyelesaian dengan cara penegakan hukum melalui proses peradilan merupakan langkah terakhir, apabila langkah diatas tidak tercapai.
- Memberikan keteladanan kepada masyarakat bahwa aparat tidak boleh main hakim sendiri, bersikap sewenang-wenang dan melakukan tindak kekerasan.
- Mengoptimalkan peran jajaran Satkowil untuk melakukan deteksi dini, temu cepat dan lapor cepat dengan menugaskan aparat Satkowil di kelurahan/desa yang memiliki bobot potensi konflik tinggi dan bersinergi dengan aparat lain.
- Mengoptimalkan peran Babinsa, diantaranya dengan menempatkan 1 (satu) atau lebih Babinsa pada setiap kelurahan yang memiliki bobot potensi konflik tinggi.
- Mengoptimalkan peran patroli Satkowil, diantaranya melalui patroli dialogis untuk memperoleh informasi tentang perkembangan situasi wilayah.
- Mengoptimalkan peran Koramil, Polsek dan Kelurahan sebagai basis deteksi dini di tengah masyarakat.
- Membangun komunikasi yang intensif dengan media massa dan jejaring sosial dalam rangka memperluas jaringan informasi.
- Mewajibkan anggota TNI AD, Polri dan ASN yang bertugas di daerah potensi konflik untuk membuat laporan informasi

tenang berbagai permasalahan yang ditemukan.

- Mewajibkan anggota TNI AD, Polri dan ASN memasukkan data potensi konflik ke dalam sistem informasi yang terintegrasi.

b. Penghentian Konflik Sosial

Dalam aspek penghentian konflik sosial, kegiatan yang dilakukan oleh jajaran Kodim 0907/Tarakan bersama dengan jajaran Polresta Tarakan dan Pemda Kota Tarakan adalah melakukan simulasi, gladi, dan kegiatan bersama serta rencana aksi bersama yang bersifat kolaboratif antara personil Kodim, Polresta dan Pemda, untuk menghentikan konflik sosial jika terjadi.

Rangkaian kegiatan simulasi penghentian konflik sosial digelar secara rutin dan sinergis antara ketiga pihak yang mencakup aksi-aksi bersama sebagai berikut :

- Memberikan pertolongan dan evakuasi korban konflik secara cepat dan tepat.
- Melakukan identifikasi terhadap korban konflik, baik korban meninggal maupun luka-luka.
- Membantu pemda/instansi terkait, antara lain dalam hal

penyiapan tempat pengungsian, perawatan medis, mendirikan dapur umum dan sebagainya.

- Melakukan isolasi untuk menghambat penyebaran konflik massa guna membatasi ruang gerak massa.
- Melakukan penyekatan terhadap jalur atau jalan yang dimungkinkan untuk masuknya massa ke lokasi / daerah konflik.
- Mencegah terjadinya konflik susulan dengan cara pengamanan agar tidak terjadi aksi balas dendam, penjagaan tempat/obyek yang menjadi sasaran massa, melakukan deteksi terhadap para pihak yang berkonflik, *counter* isu provokatif, tindakan tegas dan mem-back up untuk melaksanakan proses hukum terhadap orang yang sengaja melakukan perbuatan yang memancing terulangnya konflik.

c. Pemulihan Konflik Sosial

Dalam aspek pemulihan konflik sosial, kegiatan yang dilakukan oleh jajaran Kodim 0907/Tarakan bersama dengan Polresta Tarakan dan Pemda Kota Tarakan adalah menggelar kegiatan bersama-sama, sinergis, kerjasama,

berupa komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam tahapan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca konflik, khususnya mengamati pihak yang terlibat pada kerusuhan sosial tahun 2010 agar supaya tidak ada dendam, hidup rukun, dan melupakan masa lalu, serta menatap masa depan secara arif dan bijaksana.

Adapun kegiatan yang diterapkan oleh personil Kodim 0907/Tarakan dengan Polresta Tarakan dan Pemda Kota Tarakan dalam memberikan keamanan supaya konflik tidak berulang adalah :

- Memulihkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat supaya tetap kondusif dan tercipta kohesi sosial antar berbagai kelompok masyarakat.
- Melakukan kegiatan bakti sosial dan kesehatan pada daerah pasca konflik, khususnya di daerah yang pernah terjadi kerusuhan sosial tahun 2010.
- Memperbanyak kegiatan binter bersama Polri dan Pemda untuk menangkal berulangnya konflik sosial

dan kerusuhan massal di Kota Tarakan.

5. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penanganan Konflik Sosial

Hambatan yang dihadapi oleh Kodim 0907/Tarakan bersama dengan Polresta Tarakan dan Pemda Kota Tarakan dalam menangani konflik sosial di wilayah Kota Tarakan adalah :

- a. Persepsi masyarakat yang keliru bahwa penanganan konflik sosial merupakan tanggungjawab dan tugas Polri dan TNI semata, sehingga beberapa masyarakat masih menganggap bahwa konflik sosial adalah domainnya Polri dan TNI saja untuk menanganinya, tanpa perlu bantuan dan keterlibatan serta masyarakat.
- b. Dinamika pelaksanaan demokrasi berupa Pilkada, Pileg dan Pilpres menjadikan para politisi membawa isu politik identitas untuk meraup suara di tengah masyarakat, dengan mengedepankan isu agama, etnis, dan isu lokal lainnya sehingga membuat masyarakat terpancing, emosional, dan mengarah gesekan politik akibat perbedaan pilihan politik.

- c. Masih adanya sebagian tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat yang belum dewasa dalam menyikapi setiap persoalan sosial di tengah masyarakat, sehingga mempengaruhi masyarakat akar rumput untuk bertindak yang berpotensi melanggar hukum dan menimbulkan konflik sosial, yang pada akhirnya bisa mengarah terhadap kerusuhan sosial.
- d. Ego sektoral antar instansi dalam menangani konflik sosial di

tengah masyarakat, yaitu ada instansi yang merasa paling berwenang dalam menangani konflik sosial, ada instansi yang lepas tangan dalam menangani konflik sosial, dan ada pula instansi yang cenderung menyalahkan pihak lain, sebagai akibat dari mis komunikasi dan mis persepsi, yang bisa mempengaruhi penanganan konflik sosial di tengah masyarakat.

PENUTUP

Kota Tarakan merupakan salah satu Kota di Propinsi Kalimantan Utara yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Kota Tarakan merupakan Kota Pulau yang berada di wilayah perbatasan dengan sumber daya alam minyak yang melimpah, serta dihuni oleh penduduk yang multi etnis layaknya miniatur Indonesia.

Secara historis, pernah terjadi konflik sosial berupa kerusuhan massal tahun 2010 di wilayah Kota Tarakan sehingga menyebabkan meninggalnya korban, harta benda dan gelombang pengungsian, yang kemudian menarik perhatian nasional. Kerusuhan sosial

berupa konflik etnis antara etnis Bugis dan etnis Tidung telah mengoyak kerukunan antar etnis, keharmonisan sosial dan solidaritas masyarakat.

Potensi konflik sosial di Kota Tarakan sampai dengan saat ini masih besar, mengingat keragaman etnis, budaya, bahasa, dan adat istiadat yang ada di tengah masyarakat. Ketimpangan ekonomi masyarakat baik pendatang maupun pribumi yang kentara serta pemukiman penduduk yang berkelompok berdasarkan etnis tertentu sangat membuka peluang terjadinya konflik sosial.

Sinergi antara Kodim 0907/Tarakan bersama dengan Polresta Tarakan dan Pemda Kota Tarakan dalam mencegah, mendeteksi, menangkal, dan

meredam konflik sosial selama ini sudah cukup efektif, cukup optimal, dan cukup baik. Hal ini ditandai dengan adanya sinergi, kerjasama dan kolaborasi antara personil di ketiga pihak, khususnya dengan mengedepankan tiga pilar Kamtibmas, yakni Babinsa, Babhinkamtibmas, dan Lurah, dalam mendeteksi gangguan di tengah masyarakat.

Hambatan yang dihadapi oleh Kodim 0907/Tarakan dengan Polresta Tarakan dan Pemda Kota Tarakan dalam menangani konflik sosial adalah persepsi

masyarakat yang masih menganggap bahwa penanganan konflik sosial hanya tugas Polri dan TNI semata, partisipasi masyarakat yang rendah dalam deteksi dini di tengah masyarakat, demokrasi Pilkada, Pileg, dan Pilpres yang mengangkat isu politik identitas, tokoh masyarakat / tokoh adat / tokoh agama yang belum dewasa dalam mensikapi persoalan sosial di tengah masyarakat, serta ego sektoral antar instansi dalam penanganan konflik sosial.

DAFTAR REFERENSI

BUKU:

MoU Polri dengan TNI Nomor B/2/2018 dan Nomor Kerma/2/I/2018 Tentang Perbantuan TNI Kepada Polri Dalam Kamtibmas

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Soekanto, Soerjono, (2013), *Sosiologi : Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers.

Subagyo, Agus, (2015), *Teroris(me) : Aktor dan Isu Global Abad XXI*, Bandung : Alfabeta.

Sugiono, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, Bandung : Alfabeta.

Tippe, Syarifudin & Agus Subagyo, (2016), *Kapita Selekta Hubungan Internasional*, Bandung : Alfabeta

Triyono, Lambang, (2014), *Spiral Kekerasan Kolektif dan Konflik Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

LAIN-LAIN :

<http://www.tribunnews.com/nasional/2010/09/30/ini-kronologi-lengkap-kerusuhan-tarakan-versi-polri>. Diunduh pada tanggal 27 Mei 2018, pukul 14.00 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Tarakan. Diunduh pada tanggal 27 Mei 2018, Pukul 13.00 WIB.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.